

PERSEPSI *STAKEHOLDER* SEKOLAH TERHADAP TINGKAT KEPENTINGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Sukirman 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Gedung C6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50229

Diterima: 14 Mei 2009. Disetujui: 23 Juni 2009. Dipublikasikan: September 2009

Abstrak

Akuntansi pendidikan memberikan arti penting dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dari lembaga atau organisasi pendidikan. Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti apakah terdapat perbedaan persepsi antara penyelenggara sekolah (*internal stakeholder*) dengan *eksternal stakeholder* mengenai tingkat kepentingan penyajian laporan keuangan demi terwujudnya *good governance* pada instansi pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi antara penyelenggara sekolah (*internal stakeholder*) mengenai tingkat kepentingan penyajian laporan keuangan demi terwujudnya *good governance* pada instansi pendidikan tidak berbeda secara signifikan dengan persepsi para *eksternal stakeholder*. Hal ini telah dibuktikan dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan *Wilcoxon Rank Test*. Hasil penelitian dengan menggunakan uji *Wilcoxon Rank Test* menunjukkan hipotesis diterima.

Abstract

Educational accounting is important for ensuring the accountability of teaching and learning process in educational institutions. Based on the problems that come up, this study aims for having empirical evidence. It is whether there is a different perception between the internal stakeholders and the external stakeholders. The perception concerns with the importance of financial statements presentation for the realization of good governance in educational institutions. The results show that the perceptions of internal stakeholders and external stakeholder are not different significantly. It has been proven that the hypothesis tested by the Wilcoxon Rank Test is accepted.

© 2009 Universitas Negeri Semarang

Keywords: *annual report; internal stakeholders; eksternal stakeholders*

Pendahuluan

Era pascareformasi melahirkan kembali semangat demokratisasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek kehidupan manusia. Otonomi daerah telah membawa jiwa dan semangat tersebut dalam desentralisasi daerah. Desentralisasi dalam otonomi daerah berarti ada pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menangani beberapa sektor, seperti sistem birokrasi pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, industri, dan sektor lainnya. Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian serius adalah sektor pendidikan, mengingat pengelolaan sektor ini membutuhkan perspektif jangka panjang.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, berlangsung pula globalisasi di mana tan-

tangan yang dihadapi oleh bangsa ini ke depan akan semakin berat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendidikan menjadi pijakan dan arah roda perjalanan bangsa ini. Dalam pelayanan dan penyediaan pendidikan, terjadi persaingan antara sekolah swasta dan publik (dalam hal ini sekolah negeri). Persaingan itu seringkali tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sekolah yang bersangkutan, baik pengajar, sarana dan prasarana, maupun lulusan sekolah itu sendiri. Sekolah harus menggunakan dana dengan seefektif dan seefisien mungkin demi peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan sekolah.

Selama ini, sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggung-pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Saat ini sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban, termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan oleh tiap siswa (Rumtini & Jiyono, 1999; Sripujiningsih, 2002). Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Wahyudin (2009) tentang hubungan motivasi, *good governance* terhadap kinerja institusi pendidikan.

Akuntansi pendidikan memberikan arti penting dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dari lembaga atau organisasi pendidikan sebagaimana tercakup dalam undang-undang pendidikan nasional (Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Sebagai penjamin akuntabilitas, akuntansi memberikan gambaran secara menyeluruh tentang segala kegiatan dan aktivitas serta operasional dari lembaga atau organisasi pendidikan dari sisi keuangan (Rumtini & Jiyono, 1999).

Banyak komentar masyarakat tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan instansi pemerintah khususnya pendidikan dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya menunjukkan harapan dan kepedulian publik yang harus direspons. Namun antara harapan masyarakat terhadap kinerja institusi pendidikan sering berbeda (Supriyanto, 2000). Artinya, terjadi kesenjangan harapan (*expectation gap*) yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara institusi pendidikan dengan para *stakeholder*.

Setiap saat manusia menerima rangsangan yang jumlahnya sangat banyak dalam kehidupannya. Rangsangan-rangsangan yang hadir dalam kehidupan manusia ditangkap dengan alat indra. Dalam proses penginderaan, tidak semua rangsangan diterima dalam jumlah dan kualitas yang sama. Salah satu hal yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah faktor perbedaan persepsi.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa penelitian ini akan menguji adakah perbedaan persepsi dari para *stakeholder* sekolah terhadap tingkat kepentingan penyajian laporan keuangan sebagai wujud dari *good governance*. *Stakeholder* sekolah dibagi menjadi dua yaitu penyelenggara sekolah (kepala sekolah, guru dan karyawan) sebagai elemen dari internal *stakeholder* dan eksternal *stakeholder* yang terdiri dari komite sekolah (para orang tua dan pakar pendidikan), kreditor, *supplier*, pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan persepsi antara penyelenggara sekolah dengan eksternal *stakeholder* mengenai tingkat kepentingan penyajian laporan keuangan demi terwujudnya *good governance* pada instansi pendidikan?

Metode

Penelitian atau studi ini bermaksud mengetahui persepsi *stakeholder* sekolah terhadap tingkat kepentingan penyajian laporan keuangan sebagai perwujudan *good governance* pada instansi pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan TK di Kota Semarang.

Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh *stakeholder* sekolah yang terdiri dari internal *stakeholder* dalam hal ini penyelenggara sekolah (kepala sekolah; guru serta karyawan) dan eksternal *stakeholder* (komite sekolah (orang tua siswa, pakar pendidikan), *supplier*, kreditor,

masyarakat dan aparat pemerintah yaitu dinas pendidikan provinsi maupun kota atau kabupaten.

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data. Untuk memperoleh data sekunder, peneliti menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka dilakukan dengan mengadakan eksplorasi kepustakaan untuk mendapatkan berbagai data sekunder yang diharapkan dapat mendukung penelitian yang dilakukan peneliti. Sedangkan untuk memperoleh data primer peneliti menggunakan metode kuesioner. Dalam penyebaran kuesioner kepada penyelenggara sekolah dan eksternal *stakeholder* sekolah di Kota Semarang.

Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel bertahap (*multistage sampling*) dengan tahapan, yaitu pertama penentuan subyek (sekolah) penelitian di tingkat kabupaten/kota dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan populasi terjangkau yaitu kota Semarang. Tahapan kedua penentuan subyek (sekolah) di kecamatan dipilih dengan teknik *area sampling* berdasarkan wilayah yang terdiri dari satu kecamatan kota dan satu kecamatan pedesaan. Tahapan ketiga adalah penentuan sampel subyek (penyelenggara sekolah (kepala sekolah; guru serta karyawan) dan eksternal *stakeholder* (orang tua siswa, pakar pendidikan), *supplier*, kreditor, masyarakat dan aparat pemerintah) setiap kabupaten/kota dipilih dengan teknik *stratified random sampling* dengan status sekolah (negeri atau swasta) sebagai strata dan secara acak ditentukan subyek ini. Masing-masing variabel diukur dengan model Skala *likert* yaitu mengukur sikap dengan menyatakan penting, tidak tahu (netral) serta tidak penting dengan skor 3 (penting), 2 (tidak tahu) serta 1 (tidak penting).

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Huck & Cormier (1996) mengemukakan bahwa kualitas data yang diperoleh dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi dengan menggunakan uji reliabilitas dan validitas. Peneliti melakukan uji reliabilitas dengan menghitung *cronbach alpha* dari masing-masing item dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel dikatakan handal (*reliable*) apabila memiliki *cronbach alpha* lebih dari 0,60 (Nunnally, 1969).

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji validitas dimana uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Jika hasil signifikan atau $\text{sig} < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pertanyaan adalah *valid* (Ghozali, 2001).

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terhadap data yang diperoleh, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji suatu distribusi data (Ghozali, 2001). Jika data yang diuji terbukti berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal, maka selanjutnya dengan data-data tersebut dapat dilakukan berbagai pengujian dengan metode statistik parametrik. Jika terbukti distribusi data tidak berdistribusi normal atau jauh dari kriteria distribusi normal, maka metode parametrik tidak dapat digunakan, dan untuk itu pengujian dilakukan dengan menggunakan metode statistik non parametrik.

Pengujian hipotesis merupakan pengujian untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Dalam pengujian hipotesis ini jika data berdistribusi normal digunakan alat uji *independent sampel t test* sebagai konfirmasi, yaitu sebagai alat uji yang digunakan untuk melakukan analisis perbandingan dengan uji T untuk dua sampel yang berpasangan. Namun jika data tidak berdistribusi normal maka menggunakan alat uji *Mann Whitney test*. Uji ini dipilih karena penelitian ini menggunakan dua sampel yang independen/bebas yaitu sampel dengan subjek dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Ingin diketahui apakah kedua grup tersebut memiliki rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan. Dalam pengujian hipotesis ini, jika H_1 diterima berarti bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara penyelenggara sekolah

(*internal stakeholder*) dan eksternal *stakeholder* terhadap tingkat kepentingan penyajian laporan keuangan demi terwujudnya *good governance*.

Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai data-data yang berhasil diperoleh dan pengolahan data-data tersebut dengan tujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil pengolahan data yang diperoleh akan ditelaah dan dijabarkan sesuai dengan hasilnya. Pembahasan dalam bab ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

Responden penelitian ini adalah *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal dari seluruh *stakeholder* sekolah yang terdiri dari internal *stakeholder* dalam hal ini penyelenggara sekolah (kepala sekolah; guru serta karyawan) dan eksternal *stakeholder* (komite sekolah (orang tua siswa, pakar pendidikan), *supplier*, kreditor, masyarakat dan aparat pemerintah yaitu dinas pendidikan provinsi maupun kota atau kabupaten. Dalam penelitian ini kita menggunakan subyek penelitian pada instansi pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan TK di Kota Semarang.

Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini disebarkan kepada para *stakeholder* internal dan eksternal. Dari 75 kuisisioner yang disebarkan pada *stakeholder* internal 55 kuisisioner atau sekitar 73,33% kuisisioner dikembalikan oleh responden kepada peneliti. Sedangkan untuk *stakeholder* eksternal, dari 75 kuisisioner yang disebarkan, 60 kuisisioner atau sekitar 80% kuisisioner dikembalikan kepada peneliti. Dari 115 kuisisioner yang telah diisi dan dikembalikan oleh responden kepada peneliti, peneliti tidak menggunakan keseluruhan kuisisioner yang kembali. Peneliti melakukan penelitian mengenai kelengkapan pengisian kuisisioner. Setelah meneliti kelengkapan dari pengisian kuisisioner, peneliti akhirnya memilih 55 kuisisioner untuk masing-masing tipe responden yang akan digunakan dalam pengujian yang lebih lanjut, yaitu 55 kuisisioner untuk internal *stakeholder* dan 55 kuisisioner untuk eksternal *stakeholder*.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Huck & Cormier (1996) mengemukakan bahwa kualitas data yang diperoleh dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi dengan menggunakan uji reliabilitas dan validitas. Peneliti melakukan uji reliabilitas dengan menghitung *cronbach alpha* dari masing-masing item dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel dikatakan handal (*reliable*) apabila memiliki *cronbach alpha* lebih dari 0,60 (Nunnally, 1969).

Total responden yang digunakan adalah 55 *stakeholder* internal dan eksternal pada jenjang sekolah TK se Kota Semarang. Dari uji statistik SPSS untuk responden internal *stakeholder*, nilai *cronbach's alpha* instrumen penelitian berkisar antara 0,6109–0,8139. Sedangkan untuk responden eksternal *stakeholder*, nilai *cronbach's alpha* instrumen penelitian berkisar antara 0,6358–0,8408. Dari angka *cronbach's alpha* tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah reliabel karena angka tersebut diatas 0,60. Hasil reabilitas data tersajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Bagian	Pertanyaan	<i>Internal Stakeholder</i> (55 responden)				<i>Eksternal Stakeholder</i> (55 responden)			
		Reliabilitas		Validitas		Reliabilitas		Validitas	
		Alpha	Arti	Sig.	Arti	Alpha	Arti	Sig.	Arti
Akuntabilitas	Q1	-	-	0,000	Ok	-	-	0,001	Ok
	Q2	-	-	0,001	Ok	-	-	0,007	Ok
	Q3	-	-	0,010	Ok	-	-	0,004	Ok
	Total	0,6109	Ok	-	-	0,6358	Ok	-	-
Transparansi	Q4	-	-	0,015	Ok	-	-	0,022	Ok
	Q5	-	-	0,000	Ok	-	-	0,000	Ok
	Q6	-	-	0,000	Ok	-	-	0,000	Ok
	Total	0,7735	Ok	-	-	0,7397	Ok	-	-
<i>Value for Money</i>	Q7	-	-	0,000	Ok	-	-	0,000	Ok
	Q8	-	-	0,000	Ok	-	-	0,000	Ok
	Q9	-	-	0,000	Ok	-	-	0,000	Ok
	Total	0,7355	Ok	-	-	0,7066	Ok	-	-
Partisipasi	Q10	-	-	0,000	Ok	-	-	0,000	Ok
	Q11	-	-	0,030	Ok	-	-	0,000	Ok
	Q12	-	-	0,002	Ok	-	-	0,000	Ok
	Total	0,5050	Ok	-	-	0,4693	Ok	-	-
Neraca	Q13	-	-	0,000	Ok	-	-	0,001	Ok
	Q14	-	-	0,000	Ok	-	-	0,022	Ok
	Q15	-	-	0,000	Ok	-	-	0,006	Ok
	Q16	-	-	0,000	Ok	-	-	0,017	Ok
	Total	0,8139	Ok	-	-	0,6622	Ok	-	-
Surplus	Q17	-	-	0,000	Ok	-	-	0,000	Ok
Defisit	Q18	-	-	0,000	Ok	-	-	0,000	Ok
	Q19	-	-	0,011	Ok	-	-	0,011	Ok
	Total	0,4672	Ok	-	-	0,4672	Ok	-	-
Arus Kas	Q20	-	-	0,000	Ok	-	-	0,000	Ok
	Q21	-	-	0,000	Ok	-	-	0,000	Ok
	Q22	-	-	0,000	Ok	-	-	0,000	Ok
	Total	0,2472	Ok	-	-	0,5329	Ok	-	-
<i>Disclosure</i>	Q23	-	-	0,003	Ok	-	-	0,001	Ok
	Q24	-	-	0,010	Ok	-	-	0,002	Ok
	Q25	-	-	0,001	Ok	-	-	0,003	Ok
	Total	0,7890	Ok	-	-	0,8408	Ok	-	-

Sumber: Data primer yang diolah (2008)

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji validitas dimana uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner, Suatu kuesioner dikatakan *valid* jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Jika hasil signifikan atau $\text{sig} < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pertanyaan adalah *valid* (Ghozali, 2001).

Total responden yang digunakan adalah 55 *stakeholder* internal dan eksternal pada jenjang sekolah TK se-Kota Semarang.. Dari uji statistik SPSS untuk responden internal *stakeholder*, tingkat signifikansi berkisar antara 0,000–0,049. Sedangkan untuk responden eksternal *stakeholder*, tingkat signifikansi berkisar antara 0,000–0,046. Dari tingkat signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa korelasi antara masing-masing skor butir pertanyaan terhadap total skor butir-butir pertanyaan adalah *valid* karena angka tersebut $< 0,50$.

Uji normalitas dilakukan untuk menguji suatu distribusi data. Jika data yang diuji terbukti berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal, maka selanjutnya dengan data-data tersebut dapat dilakukan berbagai pengujian dengan metode statistik parametrik. Jika terbukti distribusi data tidak berdistribusi normal atau jauh dari kriteria distribusi normal, maka metode parametrik tidak dapat digunakan, dan untuk pengujian digunakan metode statistik non parametrik. Jika nilai signifikansi dari uji normalitas (*kolmogrov smirnov*) $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal, dan jika nilai signifikansinya $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa baik untuk tipe responden pertama yang merupakan responden internal *stakeholder* maupun tipe responden kedua yang merupakan responden eksternal *stakeholder*, memiliki nilai signifikansi diatas 0,05. Nilai signifikansi dari responden tipe 1 adalah sebesar 0,000 dan responden tipe 2 juga sebesar 0,000. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat ditentukan bahwa data tidak berdistribusi normal, sehingga pengujian data dengan menggunakan metode statistik non parametrik.

Setelah peneliti melakukan uji normalitas, dapat diketahui bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh sebab itu peneliti menggunakan metode statistik non parametrik untuk melakukan analisis terhadap data. Dalam pengujian hipotesis ini digunakan alat uji *Wilcoxon Rank test* sebagai konfirmasi, yaitu sebagai alat uji yang digunakan untuk melakukan analisis perbandingan dengan uji T untuk dua sampel yang berpasangan. Uji ini dipilih karena penelitian ini menggunakan dua sampel yang berpasangan yaitu sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda.

Berikut ini merupakan analisis pengambilan keputusan penelitian ini dengan mengamati hasil pengujian hipotesis dengan alat uji *Wilcoxon test*. Berdasarkan hasil uji *Wilcoxon test* terlihat bahwa probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas jauh $< 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa H_1 diterima. Jadi persepsi antara penyelenggara sekolah (*internal stakeholder*) mengenai tingkat kepentingan penyajian laporan keuangan demi terwujudnya *good governance* pada instansi pendidikan tidak berbeda secara signifikan dengan eksternal *stakeholder*. Hasil uji hipotesis tersajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Test Statistics	Sesudah – Sebelum
	Z
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000

a. Based on negative ranks

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Sumber: Data primer yang diolah (2008)

Dengan tidak adanya perbedaan persepsi secara signifikan mengenai tingkat kepentingan penyajian laporan keuangan demi terwujudnya *good governance* pada instansi pendidikan antara *internal stakeholder* dan *eksternal stakeholder*. membuktikan bahwa terdapat persepsi yang sama baik dari internal maupun *eksternal stakeholder*. Hal ini memiliki makna bahwa para *stakeholder* menganggap bahwa sangatlah penting disajikannya laporan keuangan sebagai wujud *good governance* pada instansi pendidikan. Bila *internal stakeholder* maupun *eksternal stakeholder* memiliki persepsi yang sama, hal ini memiliki implikasi bahwa *internal stakeholder* harus memiliki kemampuan yang kompeten dalam penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan pada akhirnya dapat digunakan baik oleh internal maupun *eksternal stakeholder* untuk menilai kinerja dari para penyelenggaran sekolah (*internal stakeholder*). Dilain pihak bila *internal stakeholder* telah mampu menyajikan laporan keuangan yang baik maka ini merupakan salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh sekolah tersebut untuk mampu memenangkan persaingan dengan instansi pendidikan sejenis yang lainnya.

Salah satu tuntutan reformasi yang harus diperjuangkan adalah upaya mewujudkan *good governance* dalam sistem pemerintahan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. *World bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta pemerintah yang bersih dan berwibawa. Adapun *united nation development program* (UNDP) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability* dan *strategic vision*. Dari sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik dan *value for money* (Mardiasmo, 2002; Bastian, 2001).

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat luas) bukan hanya pertanggungjawaban ver-

tikal (pemerintah daerah dan pusat). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi. Laporan keuangan untuk mendukung pembuat keputusan ekonomi, sosial dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya dan membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem akuntansi yang handal dan dapat memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial yang telah dicapainya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan *value for money*. Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantar pemerintah daerah mencapai *good governance*.

Value for money merupakan ekspresi pelaksanaan lembaga sektor publik yang berdasarkan 3 (tiga) elemen dasar yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi yaitu memperoleh input dengan kualitas tertentu pada harga tertentu. Ekonomi merupakan perbandingan input dan output *value*. Efisiensi adalah tercapainya *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output* atau *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja yang telah disiapkan. Efektivitas yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (target atau *result*).

Sejalan dengan berkembangnya manajemen pendidikan, dalam lingkup pendidikan formal mulai muncul Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang menjadikan pengelolaan pendidikan lebih terarah dan lebih terkoordinasi baik dari segi penyelenggaraan, pendanaan, pengembangan, dan pengawasan. Ada satu hal yang sebetulnya sangat penting dan mendasar dalam suatu organisasi terkait dengan penyelenggaraan kelancaran jalannya pendidikan dan tercerminnya kinerja sumber daya yang ada dalam dunia pendidikan, yaitu akuntansi pendidikan. Akuntansi merupakan mekanisme peringkasan, pencatatan, dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu pada suatu entitas. Oleh karena itu, dalam organisasi pendidikan, akuntansi diperlukan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan pendidikan.

Dalam mekanisme Manajemen Berbasis Sekolah perlu ditinjau unsur-unsur apa saja yang dapat dicermati dan komponen apa saja yang menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk laporan keuangan, yang dapat mencerminkan segala aktivitas organisasi (sekolah) bersangkutan. Kebijakan yang berupa desentralisasi pendidikan dalam bentuk bentuk Manajemen Berbasis Sekolah diyakini dapat meningkatkan efisiensi, relevansi, pemerataan, dan mutu pendidikan serta memenuhi asas keadilan dan demokratisasi. Hasil studi menunjukkan bahwa ada potensi yang memungkinkan keberhasilan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Hal ini terlihat dari kapasitas sekolah yang meliputi beberapa aspek yaitu: anggaran sekolah, SDM, sarana prasarana sekolah, manajemen sekolah, dan partisipasi orang tua siswa serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Untuk mencapai tujuan desentralisasi pendidikan, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama yang berkenaan dengan struktur kelembagaan pendidikan, mekanisme pengambilan keputusan, dan manajemen pendidikan di pusat, daerah, dan sekolah. Sejalan dengan itu, pemerintah perlu menyiapkan lan-

dasar hukum dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri untuk pelaksanaan desentralisasi pendidikan agar sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah dan perlunya penyelenggaraan organisasi pendidikan yang baik transparan serta akuntabel.

Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan. Beberapa pihak yang mendukung kinerja sekolah adalah kepala sekolah, guru dan karyawan, kreditor/pemberi pinjaman, orang tua siswa, *supplier*/pemasok, pemerintah dan masyarakat.

Kepala Sekolah menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan sekolah yang dipimpinnya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Keputusan yang diambil oleh Kepala Sekolah berdasarkan informasi akuntansi adalah menentukan peralatan apa yang sebaiknya dibeli, berapa persediaan ATK yang harus ada di bagian perlengkapan, dan lain-lain.

Guru dan Karyawan mewakili kelompok yang tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas di institusi pendidikan (sekolah). Ini berarti kelompok tersebut juga tertarik dengan informasi penilaian kemampuan sekolah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

Kreditor atau pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. (Hal ini berlaku apabila ada kasus sekolah yang memerlukan kreditor). Para orang tua siswa berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup institusi pendidikan, terutama perjanjian jangka panjang dan tingkat ketergantungan sekolah.

Pemasok tertarik dengan informasi tentang kemungkinan jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan terhadap alokasi sumber daya dan karena itu, berkepentingan dengan aktivitas sekolah. Informasi dasar ini dibutuhkan untuk mengatur aktivitas sekolah, menetapkan kebijakan anggaran, dan mendasari penyusunan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Adapun institusi pendidikan mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara. Laporan keuangan Institusi Pendidikan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir pengelolaan keuangan.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi pembiayaan. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa komponen laporan keuangan, yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, serta Laporan Arus Kas yang juga dilengkapi oleh Catatan atas Laporan Keuangan, seperti pada *annual report* dan prospektus.

Neraca, ibarat sebuah foto, hanya menampilkan gambaran institusi pendidikan pada saat tanggal neraca saja. Sebagai perbandingan, laporan ini juga menampilkan foto pada periode yang sama tahun lalu. Jadi, foto tersebut merupakan gambaran posisi keuangan (*financial position*) dari suatu lembaga. Akun-akun transaksi dalam neraca dapat dilihat pada Tabel 3.

Laporan laba rugi atau surplus defisit adalah laporan yang menggambarkan dalam institusi kinerja keuangan entitas (dalam satu periode akuntansi). Kinerja, dalam hal ini, digambarkan sebagai kemampuan suatu entitas untuk menciptakan pendapatan. Laporan keuangan jenis ini memuat kinerja suatu entitas dalam satu periode, misalnya satu tahun. Keuntungan dan kerugian entitas selama satu tahun serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan juga dimuat di sini. Dalam akuntansi, laba atau rugi merupakan selisih dari seluruh pendapatan dan seluruh biaya. Jika total pendapatan lebih besar daripada total biaya, maka surplus laba akan terjadi, dan jika total biaya lebih besar daripada total pendapatan, maka yang terjadi adalah defisit/rugi. Akun-akun transaksi dalam laporan surplus defisit dapat dilihat pada Tabel 4.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Di dalam laporan arus kas, perubahan posisi kas akan dilihat dari tiga sisi, yakni dari kegiatan operasi, investasi dan pembiayaan. Sesuai namanya, laporan ini akan memberikan informasi tentang arus kas masuk maupun keluar dari institusi pendidikan yang berguna untuk memberikan gambaran tentang alokasi kas ke dalam berbagai kegiatan institusi pendidikan.

Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menyajikan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Perbedaan dari kedua metode tersebut terletak pada cara memperoleh angka arus kas dari aktivitas operasi. Pada metode tidak langsung, caranya adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap *net income* (laba bersih), sedangkan pada metode langsung benar-benar arus kas riil yang dihitung. Walaupun demikian, angka yang diperoleh dari kedua metode tersebut sama. Karena metode langsung lebih banyak membutuhkan waktu dan biaya, entitas lebih suka memilih metode tidak langsung, seperti yang digunakan dalam buku ini. Akun transaksi dalam Laporan Arus Kas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 3. Komponen Neraca

	Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Aktiva ini terdiri dari:	
	Aset/Aktiva Lancar	Aset/Aktiva Tetap
Aset/aktiva	Kas	Tanah
	Piutang	Gedung
	Cadangan Penghapusan Piutang	Peralatan Kantor
	Piutang Wesel	Perlengkapan kantor
	Sediaan Barang Dagangan	
	Sediaan Bahan Habis Pakai	
	Asuransi dibayar di muka	
	Sewa tempat dibayar di muka	
	Kewajiban merupakan utang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.	
		Kewajiban Lancar
Utang/kewajiban	Utang	Utang bank
	Utang biaya bunga	
	Utang gaji dan honorarium	
	Utang pajak penghasilan	
	Modal adalah hak residual atas aktiva entitas setelah dikurangi semua kewajiban	
Modal	Setoran modal dari entitas	
	Saldo laba	
	Dana Cadangan	

Sumber: Bastian, 2007

Tabel 4. Komponen Surplus Defisit

Pendapatan	Arus masuk atau peningkatan lain aktiva sebuah entitas atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) dan pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama dan masih berlangsung dari entitas tersebut
Biaya	Arus kas keluar atau penggunaan lain suatu aktiva atau timbulnya utang (atau kombinasi dan keduanya) dari pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama dan masih berlangsung dan entitas tersebut.
Surplus (laba)	Kenaikan ekuitas dari transaksi-transaksi tambahan atau insidental dan semua transaksi lainnya atau kejadian serta keadaan lain yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh suatu entitas (institusi pendidikan: sekolah).
Defisit (rugi)	Penurunan ekuitas dari transaksi-transaksi tambahan atau insidental dan dan semua transaksi lainnya, atau kejadian serta keadaan lain yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh suatu entitas (institusi pendidikan: sekolah).

Sumber: Bastian, 2007

Tabel 5. Komponen Arus Kas

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Penurunan Aktiva Lancar Non Kas Kenaikan Utang Jangka Pendek Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Kenaikan Aktiva Lancar Nonkas Penurunan Utang Jangka Pendek
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Penurunan Investasi Jangka Panjang Penurunan Aktiva Tetap Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Kenaikan Investasi Jangka Panjang Kenaikan Aktiva Tetap
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan Kenaikan Utang Jangka Panjang Kenaikan Dana Ekuitas Kenaikan Dana Cadangan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan Penurunan Utang Jangka Panjang Penurunan Dana Ekuitas Penurunan Dana Cadangan

Sumber: Bastian, 2007

Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai berusia enam tahun. Pendidikan ini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar si anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD terbagi menjadi formal, non formal dan informal. PAUD jalur pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur sebagai upaya pembinaan dan pengembangan anak berusia 4 sampai 6 tahun, yang dilaksanakan melalui Taman Kanan-Kanak Raudhatul Athfal dan bentuk lain yang sederajat. PAUD jalur pendidikan nonformal adalah pendidikan yang melaksanakan program pembelajaran secara fleksibel sebagai upaya pembinaan dan pengembangan anak sejak lahir sampai berusia enam tahun, yang dilaksanakan melalui Taman Penitipan Anak, Taman Bermain dan bentuk lain yang sederajat. Sedangkan PAUD jalur pendidikan informal adalah upaya pembinaan dan pengembangan anak sejak lahir sampai berusia enam tahun, yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Organisasi publik dalam hal ini organisasi dan lembaga pendidikan menggunakan sistem akuntansi sebagai alat untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Akuntansi dalam BH PAUD memiliki tiga tujuan utama yaitu pertanggungjawab, manajerial dan pengawasan. Pendanaan BHPAUD berkaitan dengan sumber dana dan pengelolaan dana. Sumber dana dalam BHPAUD meliputi dana yang berasal dari pemerintah berupa *blockgrant* yang berasal dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk dana pendidikan dari orang tua peserta didik PAUD.

Secara teoritis, semua *stakeholder* baik internal maupun *eksternal stakeholder* memiliki kepentingan yang sama terhadap penyajian laporan keuangan. Diharapkan dengan tidak adanya perbedaan persepsi mengenai tingkat kepentingan penyajian laporan keuangan maka merupakan tuntutan tersendiri khususnya bagi pihak penyelenggara sekolah (*internal stakeholder*) untuk mampu menyajikan laporan keuangan secara periodik.

Penutup

Berdasarkan pengujian yang telah dilaksanakan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, persepsi antara penyelenggara sekolah (*internal stakeholder*) mengenai tingkat kepentingan penyajian laporan keuangan demi terwujudnya *good governance* pada instansi pendidikan tidak berbeda secara signifikan dengan *eksternal stakeholder*. Hal ini telah dibuktikan dalam pengujian menggunakan *Wilcoxon Rank test* yang menunjukkan probabilitasnya $< 0,05$.

Beberapa keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam penelitian ini dan saran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang lebih lanjut, antara lain penelitian ini hanya dilaksanakan terhadap para *stakeholder* pada jenjang pendidikan TK saja. Sebagai saran lebih lanjut, sebaiknya penelitian dapat dilaksanakan pada instansi pendidikan dengan jenjang yang lebih beragam. Hal ini dapat dilakukan dengan penelitian lebih lanjut pada jenjang pendidikan SD, SMP maupun SMA. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kedalaman penelitian.

Kedua, penelitian ini hanya dilaksanakan terhadap para *stakeholder* instansi pendidikan di Kota Semarang. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar jumlah responden diperbanyak dengan melibatkan para *stakeholder* dari instansi pendidikan di kota yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan kualitas hasil penelitian.

Daftar Pustaka

- , 2007. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga
- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Chamidi, S.I. 2004. *Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Berbasis Sekolah*. Isu-Isu Pendidikan Di Indonesia: Lima Isu Pendidikan Triwulan Kedua. Pusat Data Dan Informasi Pendidikan, Balit-

bang Depdiknas

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta

Rumtini dan Jiyono. 1999. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep dan Kemungkinan Strategi Pelaksan-
aannya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 5 No. 17

Sripujiningsih. 2002. *Model Pengukuran Kinerja Perguruan Tinggi dengan Pendekatan Balance Scorecard
(Suatu Studi di Universitas Negeri Yogyakarta)*. Tesis. Yogyakarta: S-2 UGM

Supriyanto. 2000. *Persepsi Guru terhadap Manfaat Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan dan Desentralisasi
Anggaran Pendidikan*. Skripsi. Yogyakarta: UGM

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Wahyudin, A. 2009. Analisis Hubungan Motivasi, Good Governance terhadap Kinerja Institusi Pendidikan
yang Dimoderasi Karakteristik Biografi. *Jurnal Dinamika Akuntansi*